

**PENGUKURAN RENCANA AKSI KECAMATAN LAPPARIAJA TAHUN 2022
MONITORING DAN EVALUASI SAKIP**

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ PROSES	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET	ANGGARAN	TARGET REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				TARGET KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TAHUN 2022				CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2022				FAKTOR	
								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	PEND UKU NG	PENGHAMB AT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	(%)	100	9,962,260,070.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya Realisasi Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten /Kota
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran kinerja serta evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	100	47,814,790.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum Optimalnya Laporan Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan yang tersusun (Dokumen)	Dokumen	5	34,942,900.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Usulan Perencanaan kadang terhambat oleh terlambatnya Ketersediaan Satuan standar harga (SSH)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian Kinerja Yang Tersusun dan dilaporkan sesuai kewajiban Perangkat Daerah	Dokumen	3	12,871,890.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Keterlambatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dikarenakan waktu yang kurang Efisien
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	100	9,662,403,120.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Terjadinya perubahan pagu anggaran yang signifikan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan Per Bulan bagi ASN Perangkat Daerah ASN	Bulan	12	9,662,403,120.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Sering terjadinya kelebihan Pagu anggaran

			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Priodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen	100	9,840,400.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	Dokumen	1	9,840,400.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	ada beberapa kegiatan insidental ditingkat kecamatan yang tidak dapat dipenuhi dengan pengadaan pakaian khusus (seragam)
			Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Periodik Iktisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase	100	136,617,880.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penunjang Administrasi Perkantoran Sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	Paket	36	14,492,410.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Terkadang kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Makanan dan Minuman Harian Bagi Pegawai, Rapat dan Tamu sesuai rencana kebutuhan (Paket)	Paket	3	52,835,470.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	kurangnya bahan makanan di SSH aset pada aplikasi

			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai kebutuhan (Paket)	Paket	1	5,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Penggandaan dokumen tersebar di beberapa sub kegiatan
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan (Paket)	Kali	2	3,600,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	kurangnya minta baca terhadap bacaan perundang-undangan
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)	Kegiatan	50	60,690,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Pemberian SPPD tidak menyeluruh di tiap Kepala seksi	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat	Paket	100	37,092,500.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Pengadaan Barang Belum sepenuhnya terpenuhi	

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lappari	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran (Paket)	Unit	5	37,092,500.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Jumlah Pemakaian Bahan bakar minyak yang Tidak Menentu di setiap kali pemakaian yang dibarengi dengan kurangnya Kendararaan Transportasi Kantor	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah	(%)	100	48,862,980.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Kurang maksimalnya Pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket pembayaran jasa komunikasi (data internet), air dan listrik bulanan sesuai rencana kebutuhan (Kali)	kali	24	5,876,580.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Karena Adanya Jumlah Pemakaian Listrik Yang Tidak Menentu di setiap bulan, Akhirnya Mempengaruhi Jumlah Anggaran Yang Terpakai

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran (Orang)	Orang	6	42,986,400.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Adanya Pembayaran Lunas Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga Honorer yang Pembayaran tidak Sesuai di Setiap Bulannya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	(%)	100	56,720,900.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Kurang maksimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan terbayar pajaknya secara rutin/berkala per tahun (Unit)	Unit	2	51,840,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Kendaraan yang terbatas dengan standar harga yang sudah di tentukan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor sesuai Rencana Kebutuhan (Paket)	Paket	1	4,880,900.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	kurangan pekerja yang biasa melakukan pemeliharaan Gedung Kantor

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase	100	15,127,450.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	1	15,127,450.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Kurangnya Koordinasi antar Opd Tehnis
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang diikuti dan dilaksanakan	Kegiatan	1	15,127,450.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Pada saat pelaksanaan Musrenbang terkadang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan (%)	(%)	100	15,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan Desa yang diikuti dan dilaksanakan	Kegiatan	2	15,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Kurangnya Koordinasi antar Opd Tehnis
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kegiatan)	Kegiatan	2	15,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Pada saat pelaksanaan Musrenbang OPD pulang sebelum kegiatan berakhir
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	(%)	100	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum terpenuhinya Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tepat waktu
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Orang	3	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum optimalnya kordinasi kegiatan pemberdayaan desa

			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Sinergitas dengan kepolisian NKRI, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Orang)	Orang	3	27,000,000.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Masih Kurangnya Koordinasi antar Desa sehingga Laporan Pokja Desa sering Terlambat yang mempengaruhi Ketidambatan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Cakupan peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa (%)	(%)	100	33,961,100.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum sepenuhnya terpenuhi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Realisasi Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Laporan	9	33,961,100.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Belum Optimalnya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa (Laporan)	Laporan	9	9,576,600.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Masih kurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa

			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa (Laporan)	Laporan	9	24,384,500.00	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Masih klurangnya partisipasi Desa dalam hal pelaporan pembuatan Peraturan Desa
--	--	--	--	--	---------	---	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--



 Camat LAPPAN
 YUSUF SIPA
 Pangkat : Pe
 Nip. 19630905

TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
27	28	29
Perlu adanya Peningkatan Kinerja dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah	Camat dan Sekretaris	
Perlu adanya Ketetapan Waktu dalam Hal Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat	

Perlu adanya Keterseediaan Satuan Standar Harga Sebelum Menyusun Perencanaan Peran	kasubag program dan keuangan	
Memfaatkan Waktu Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tepat waktu	kasubag program dan keuangan	
Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran mengikut anggaran perubahan daerah	Sekretariat	
Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian	Sekretariat, Kasubag program dan keuangan	

Perlu adanya kelengkapan pengadaan ministrasian Barang milik Daerah yang memadai	kasubag Umum dan Kepegawaian	
menggunakan pakaian seragam yang sama untuk kegiatan insidental	kasubag Umum dan Kepegawaian	
Perlu adanya kelengkapan pengadaan ministrasian umum yang memadai	Sekretariat	
Diperlukan peralatan dan perlengkapan yang memadai sesuai dengan	kasubag program dan keuangan	
perlu penyempurnaan Sn=tandar harga yang signifikan pada aplikasi	kasubag program dan keuangan	

25

18

penggad naan dokume n seharu nya terpusat pada satu sub kegiatan	kasubag program dan keuanga n	
Perlu diadaka n minat baca pada pegawai asn	kasubag program dan keuanga n	
perlu diadaka n pembagi an sppd pada semua kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian	Kasi pelayan an umum dan kasubag umum dan kepega waian	
Perlu diadaka n pengus ulan Barang yang sesuai dengan kebutu han	Sekretar is	

Penambahan kendaraan Dinas untuk Operasional Pelayanan kepada masyarakat dan Memperlancar kegiatan Monev ke desa-desa	kasubag program dan keuangan	
Perlu adanya kesesuaian dalam pengelolaan penyediaan sarana prasarana penunjang	Sekretariat	
Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap	kasubag program dan keuangan	

1

9

Perlu adanya Ketetapan Standar Pembayaran Jaminan Kesehatan Tenaga Honorer yang Merata	kasubag program dan keuangan	
Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah	Sekretaris	
perlu dilakukan koordinasi dengan aset terkait dengan biaya pemeliharaan kendaraan kepasd	Kasi pelayanan umum dan kasubag umum dan kepegawaian	
ditentukan pekerja yang lebih dalam rangka pemeliharaan gedung kantor secara berkelola	Kasi pelayanan umum dan kasubag umum dan kepegawaian	

Dipentuk an kerjasa ma antar Tim dalam proses Penyele nggaraa n Pemerin tasan	Kasi pelayan an umum dan kasubag umum dan kepega waian	
masih perlu pembagi an kerja dalam hal penyele nggaraa n pemerint ahan tingkat keempat	Kasi pelayan an umum dan kasubag umum dan kepega waian	
perlu diadaka n rapat Tim dalam pelayan an spped OPD yang datang bermusr enbang	Kasi pelayan an umum dan kasubag umum dan kepega waian	
Diperlu kan kerjasa ma antar Tim dalam proses Penyele nggaraa n Pemerin tahan Da lam	Camat dan Sekretar iat	

<p>masin perlu pembagian kerja dalam hal penyelesaian pemerintahan</p>	<p>Kasi PPMD dan Kasi Perekonomian PAD dan kesejahteraan</p>	
<p>perlu diadakan rapat Tim dalam pelayanan sspd OPD yang datang bermusr</p>	<p>Kasi PPMD dan Kasi Perekonomian PAD dan kesejahteraan</p>	
<p>Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Camat dan Sekretaris</p>	
<p>Diperlukan stekholder dan pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan</p>	<p>Sekretaris</p>	

Perencanaan Koordinasi dan Sinergitas antar Pokja Desa dan FKKS dalam Hal Penyusunan	Seksi Trantibun	
perlu Stakeholder dalam hal pembinaan dan Pengawasan	Camat dan Sekretaris	
Diperlukan partisipasi aktif bagi Kepala Desa dalam hal Pembinaan dan Pengawasan Desa	Kasi Trantibum, Kasi Pemerintahan, Kasi PPM	
perencanaan Bimbingan Teknis kepada para kepala desa dalam hal penyusunan	Kasi Trantibum dan Kasi Pemerintahan, Kasi PPM	

perlu diadaka n Bimbing an Teknis kepada para kepala para kepala desa dalam hal penyusu nan Peraturan	Kasi Trantibu m dan Kasi Pemerin tahan,K asi PPMD	
---	--	--

PARIAJA



ibina Utama Muda,IV/c

198903 1 005